



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati; |
| | b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2024. |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9); |

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 02 Seri D);
44. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 277);
50. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 129 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 55 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 55);
51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 23 Tahun 2022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 44);
52. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disusun berpedoman pada:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

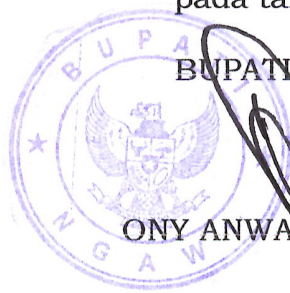
- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI NGAWI,
ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 93

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan renja, meliputi beberapa tahapan terdiri dari:

- a. Persiapan penyusunan, kegiatan pada tahap ini terdiri dari:
1. Pembentukan Tim penyusunan Renja perangkat daerah yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua TIM : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sekretaris : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kelompok kerja : susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketahui oleh Kepala unit Kerja dengan anggota Pejabat/Staf perangkat daerah dan instansi lain unsur pemerintahan/non pemerintahan yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli

Tim penyusunan renja PD mempunyai tugas:

- Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi
 - Menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan
2. Orientasi mengenai renja Perangkat Daerah
 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renja perangkat daerah. Penyusunan renja perangkat daerah dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan peraturan kepala daerah tentang renja perangkat daerah.

4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan renja perangkat daerah
- b. Penyusunan rancangan awal renja
- c. Penyusunan rancangan renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah
- e. Perumusan rancangan akhir renja
- f. Penetapan renja dengan peraturan kepala daerah

Dinas perpustakaan dan kearsipan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan berpedoman pada misi yang di emban yaitu misi ke-1 dan misi ke-3, misi kesatu adalah Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan sedangkan misi ke tiga adalah Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima dengan tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik, untuk mencapai tujuan misi tersebut Dinas Perpustakaan dan kearsipan menjabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam dokumen rencana strategis (renstra). Dokumen Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, sehingga Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
30. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
34. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupateb/Kota layak Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
35. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri dalam negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2013;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
 48. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8); dan
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9).
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 nomor 1);
 54. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:

55. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 55 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 55);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah Untuk memberikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama periode 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021-2026;
2. Menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta prioritas kegiatan sehingga mengarah pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan;
3. Sebagai alat ukur atas segala hasil pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam segala bentuk pelaporan;
4. Sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan renja perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah.
6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP nomor 6 Tahun 2008

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah.

Berisikan uraian mengenai:

- a. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pendanaan.
- b. permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap program nasional/internasional, seperti NSPK, SPm dan SDGs (suistanable Development Goals)
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- b. penkelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
- c. penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan-perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap kegiatan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten ngawi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud. yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

menjelaskan tentang faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Cacatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah=kaidah pelaksanaan;

3. Rencana tindak lanjut;
4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama dan tempat tanda tangan Bupati Ngawi, serta tempat stempel Bupati Ngawi

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi

Evaluasi terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Renstra Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi telah mengalami penyesuaian mengikuti dinamika kebijakan maupun tuntutan kinerja yang harus dipenuhi dan pada Tahun 2022 telah melaksanakan review Renstra terhadap indikator dan target Renstra 2021-2026, sedangkan sasaran strategis dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten ngawi Tahun 2021-2026 yang baru yaitu :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah dengan indikator Hasil LHE AKIP Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat dengan indikator indeks pembangunan literasi masyarakat
3. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan daerah yang sesuai prinsip dan kaidah Kearsipan Nasional dengan indikator indeks kearsipan
4. Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap pelayanan kearsipan dengan indikator tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan kearsipan

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten ngawi sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

- a. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota target dengan indikator nilai tingkat kegemaran membaca 65 hanya terealisasi hanya 60,30
- b. Program pengelolaan arsip Persentase perangkat daerah yang telah menyerahkan arsip statisnya ditargetkan 30% hanya terealisasi sebesar 5.45%

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan.

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- j. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
- k. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
- l. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
- m. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
- n. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
- o. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten Kota

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang telah direncanakan.

- a. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial ditargetkan Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun sebanyak 17050 orang terealisasi sebesar 27134 sehingga capaian sub kegiatan tersebut 159.14%

- b. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun sub kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun ditargetkan 2 arsip terealisasi 3807 arsip sehingga capaiannya sebesar 190.35%

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

- a. Tidak tercapainya kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota target dengan indikator nilai tingkat kegemaran dikarenakan ada beberapa indikator Tingkat Kegemaran masyarakat ada pada kategori sedang, durasi membaca skor 56,7, jumlah buku yang dibaca dengan skor 55,2. Program pengelolaan arsip dengan indikator Persentase perangkat daerah yang telah menyerahkan arsip statisnya dikarenakan masih rendahnya pemahaman perangkat daerah terhadap penataan arsip/system kearsipan
- b. terpenuhinya target kegiatan sesuai dengan target yang direncanakan dikarenakan perencanaan target kinerja yang matang.
- c. melebihinya target kinerja dari kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dengan indikator Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bidang perpustakaan seperti: promosi perpustakaan melalui workshop, pelatihan keterampilan, layanan dogeng anak dan Kerjasama antar lembaga pendidikan maupun Lembaga lain yang berfokus pada peningkatan literasi masyarakat sedangkan melebihinya target kinerja Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun sub kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) dengan indikator Jumlah arsip yang dinyatakan musnah sesuai NSPK yaitu

sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh bidang pengampu kepada pengelola kearsipan OPD tentang pemusnahan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 210 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip Peraturan Bupati Ngawi

5. Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra perangkat daerah.

Dengan tidak tercapainya target capaian kegiatan akan mempengaruhi capaian program renstra karena sesuai pengukuran kinerja berjenjang sesuai pembobotan setiap indikator akan mempengaruhi capaian kinerja diatasnya

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

- a. Penentuan indikator mengacu pada metode SMART yaitu Spesifik, Measureable, Achieveble, Relevan dan Time Bond.
- b. Penentuan target berdasarkan prinsip achievable artinya target ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia dan berdasarkan data capaian realisasi tahun2 sebelumnya dan kondisi saat ini
- c. Penyusunan anggaran kas sesuai ketersediaan dan aliran dana transfer.

hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Pencapaian Renstra
s/d Tahun (n-1/tahun berjalan)**

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (renstra PD) Tahun 2023		Realisasi target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan Tahun lalu					Target program dan Kegiatan(renja perangkat daerah) 2023		perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah sampai dengan tahun berjalan (2023)	
							Target Renja perangkat daerah tahun (2022)		Realisasi renja perangkat daerah tahun(2022)		Tingkat realisasi 2022(%)			realisai capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan(2023)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN														
2.23	PROGRAM PENUNJANG	% Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	3
2.23.1 1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
2.23	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	3
2.23.1 1 2.01	Kinerja Perangkat Daerah														
2.23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100%	6	dokumen	18	3
2.23.1 1.2.01.1															

		Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah yang disusun	4	dokumen	5	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	4	dokumen	13	3.25
2.23 2.23.1 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7	dokumen								7	dokumen	7	1
		jumlah laporan kinerja opd yang disusun tepat waktu			7	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100%			13	
2.23 2.23.1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100%			200	2
2.23 2.23.1 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN yang disusun	26	dokumen	26	dokumen						26	dokumen	52	2
		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	884	orang	0							884	orang	884	1
		jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	0	0	0		14	kali	14	kali	100%			14	
		jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN yang disusun	0		0		26	dokumen	26	dokumen	100%			26	
2.23 2.23.1 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan								1	laporan	1	1
		Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun			1	dokumen								1	
2.23 2.23.1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100		100	%	100	%	100	%	100%	100		300	3

2.23 2.23.1 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	34	paket								34	paket	34	1
		jumlah pakaian batik yang diadakan					45	orang	45	orang	100%			45	
		jumlah pakaian korpri yang diadakan					35	orang	35	orang	100%			35	
2.23 2.23.1 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34	orang								34	orang	34	1
		jumlah asn yang mengikuti diklat	45	orang			45	orang	45	orang	100%			45	1
		jumlah pelatihan senam yang dilaksanakan	12	kali			12	kali	12	kali	100%			12	1
2.23 2.23.1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	3
2.23 2.23.1 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket								4	paket	4	1
		% pemenuhan kebutuhan instalasi listrik	100	%	100	%	100	%	100	%	100%			200	2
2.23 2.23.1 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	paket								4	paket	4	1
2.23 2.23.1 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	paket								4	paket	4	1

		jumlah makanan yang disediakan			410	kotak	1680	kotak	1680	kotak	100%			2090	
		Jumlah minuman campur yang disediakan			50	gelas								50	
		Jumlah minuman yang disediakan			360	botol								360	
		jumlah minuman yang disediakan					20	dus	20	dus	100%			20	
		jumlah air isi ulang yang disediakan					240	galon	240	galon	100%			240	
		jumlah makanan vip yang disediakan					80	kotak	80	kotak	100%			80	
2.23 2.23.1 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket								2	paket	2	1
		jumlah barang yang dicetak			232	lembar	500	kotak	500	lembar	100%			732	
		jumlah barang yang digandakan			4757	lembar	5449	lembar	5449	lembar	100%			10206	
		jumlah iklan / publikasi di di media cetak			23	kali	9	kali	9	kali	100%			32	
2.23 2.23.1 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli			288	majalah								288	
		Jumlah surat kabar yang dibeli			1008	eksemplar								1008	
2.23 2.23.1 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27	laporan								27	laporan	27	1
		Jumlah mamin Rapat SKPD yang disediakan	720	kotak								720	kotak	720	1

		jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadapi			6	kali	35	kali	35	kali	100%			41	
		jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dihadapi			25	kali	9	kali	9	kali	100%			34	
2.23 2.23.1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	300	3
2.23 2.23.1 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang terkirim			23	surat	15	surat	15	surat	100%			38	
2.23 2.23.1 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	Laporan								60	Laporan	60	1
		Jumlah Iklan Publikasi di Media Cetak	1	kali								1	kali	1	1
		Jumlah rekening internet yang dibayar			12	rekening	12	rekening	12	rekening	100%			24	
		Jumlah rekening listrik yang dibayar			12	rekening	12	rekening	12	rekening	100%			24	
		Jumlah rekening telpon yang dibayar			12	rekening	12	rekening	12	rekening	100%			24	
		Jumlah rekening air yang dibayar			12	rekening	12	rekening	12	rekening	100%			24	
2.23 2.23.1 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48	laporan								48	laporan	48	1
		Jumlah alat kebersihan yang dibeli			80	buah	30	buah	30	buah	100%			110	
		Jumlah bahan kebersihan yang dibeli			170	buah	90	buah	90	buah	100%			260	

		Jumlah pembayaran jasa tenaga kebersihan			36	buah	36	kali	36	kali	100%			72	
		Prosentase pemenuhan kebutuhan ATK			100	%	100	%	100	%	100%			200	
2.23 2.23.1 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4	laporan								4	laporan	4	1
		Jumlah buku cek bank yang dibeli			3	buku	3	buku	3	buku	100%			6	
		Jumlah materai yang dibeli			600	lembar	800	lembar	800	lembar	100%			1400	
		Jumlah pembayaran honor			72	kali	72	kali	72	kali	100%			144	
2.23 2.23.1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah yang terpelihara dalam setahun	100	%	100	%	100	%	100	%	100%			200	2
2.23 2.23.1 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	0		1	unit	1	unit	1	unit	100%	0		2	
2.23 2.23.1 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			4	kali	4	kali	4	kali	100%			8	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajak dan perizinannya	7	unit								7	unit	7	1
		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayar pajaknya			6	unit	6	unit	6	unit	100%			12	

		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional			18	kali	18	kali	18	kali	100%			36	
2.23 2.23.1 1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubelair yang dipelihara			4	unit								4	
2.23 2.23.1 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	unit								10	unit	10	1
		Jumlah pemeliharaan peralatan kerja					24	kali	24	kali	100%			24	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			30	kali								30	
2.23 2.23.1 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	3									3	unit	3	1
		Luasan gedung kantor yang dipelihara					20	m2	20	m2	100%			20	
		Jumlah bunga yang disewa dalam setahun					15	bunga	15	bunga	100%			15	
		Luasan gedung kantor yang dipelihara			1568	m2								1568	
2.23 2.23.1 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor			16	kali								16	
2.23 2.23.1 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan yang terakreditasi minimal B	2	perpustakaan								2	perpustakaan	2	1
		persentase perpustakaan yang sesuai snp			100	%	100	%	100	%	100%			200	

		Jumlah sarpras pendukung SDM tenaga perpustakaan dan pustakawan			12	unit								12	
2.23 2.23.1 2.2.01.8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diadakan			2434	buku								2434	
2.23 2.23.1 2.2.01.9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	150 0	buku								1500		1500	1
		Jumlah bahan pustaka yang diolah					5000	buku	5000	buku	100%			5000	
		Jumlah bahan pustaka yang diolah			11500	buku								11500	
		Jumlah peserta bimtek pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka			75	peserta								75	
		Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan pengelolaan bantuan ke masjid			682	orang								682	
		Jumlah Al Quran braille yang diadakan			3	buku								3	
		Jumlah E-book yang diadakan			1880	copy								1880	
2.23 2.23.1 2.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten/Kota	1	dokumen								1	dokumen	1	1
2.23 2.23.1 2 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat					65	nilai	60.3	nilai	93%	68		128.3	

2.23 2.23.1 2.2.02.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	22	lokus								22	lokus	22	1
2.23 2.23.1 2.2.02.3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta gerakan pembudayaan minat baca					300	orang	300	orang	100%	0		300	
		Jumlah kelompok masyarakat yang menerima hibah uang			1	copy								1	
		Jumlah pelaksanaan lomba kegiatan gemar membaca			13	kali								13	
		Jumlah titik sirkulasi buku yang dikunjungi			48	titik								48	
		Jumlah dokumen survey Indeks Budaya Baca			1	dokumen								1	
2.23 2.23.1 2.2.02.4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	22	perpustakaan								22	perpustakaan	22	1
		Jumlah pelaksanaan PLM Kegiatan					6	kali	6	kali	100%			6	
		Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun					17050	orang	17050	orang	100%			17050	
		Jumlah dokumen survey indeks pembangunan literasi masyarakat					1	dokumen	1	dokumen	100%			1	
		Jumlah kegiatan transformasi berbasis inklusi sosial tingkat Kabupaten					6	kegiatan	6	kegiatan	100%			6	
		Jumlah pelaksanaan akreditasi perpustakaan					1	kali	1	kali	100%			1	

		Jumlah pelaksanaan survey TGM Provinsi					1	kali	1	kali	100%			1	
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelibatan masyarakat di Perpustakaan					300	peserta	300	peserta	100%			300	
		Jumlah desa yang terfasilitasi untuk kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial			30	desa								30	
		Jumlah kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan di tingkat kabupaten			25	kegiatan								25	
		Jumlah pelaksanaan PLM Kabupaten			6	kali								6	
		Jumlah dokumen survey Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			1	dokumen								1	
2.23 2.23.1 3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	cakupan peningkatan pelestarian naskah kuno dan koleksi lokal			100	%	100	%	100	%	100%			200	
2.23 2.23.1 3 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	cakupan peningkatan naskah kuno milik daerah kab/kota yang dilestarikan			100	%	100	%	11.1 1	%	11%			111.11	
		Jumlah naskah kuno yang disimpan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan												0	
2.23 2.23.1 3.2.01.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah peserta sosialisasi penelusuran naskah kuno					100	peserta	100	peserta	100%	0		100	
		Jumlah titik penelusuran naskah kuno					9	kali	9	kali	100%			9	

		Persentase OPD yang sudah melaksanakan pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis sesuai aturan yang berlaku			11	%								11	
2.24 2.23.1 2 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang sudah dikelola					30	%	63.4 9	%	212%	35	%	98.49	
2.24 2.23.1 2.2.02.2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50	arsip								50	arsip	50	1
		jumlah gedung depo yang dibangun					1	gedung	1	gedung	100%			1	
		jumlah dokumen pengawasan pembangunan Depo arsip					1	dokumen	1	dokume n	100%			1	
		Jumlah sarpras gedung depo arsip					3	jenis	3	jenis	100%			3	
		Jumlah arsip statis OPD yang sudah diserahkan			50	arsip								50	
2.24 2.23.1 2 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	30	%			25	%	63.3	%	253%	30	%	93.3	3.11
2.24 2.23.1 2.2.03.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	15	laporan								15	laporan	15	1
		Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui Aplikasi JIK					50	arsip	50	arsip	100%			50	

		Jumlah dokumen perencanaan DED pembangunan gedung depo arsip			1	dokumen								1	
2.24 2.23.1 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase PD yang telah menyerahkan arsip statisnya					30	%	5.45	%	18%			5.45	
		jumlah arsip statis yang terlindungi dan terlestarikan	500	arsip								500	arsip	500	1
2.24 2.23.1 3 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase arsip yang dimusnahkan					25	%	91.2 3	%	365%	30	%	121.23	
2.24 2.23.1 3.2.01.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 0	arsip								1000	arsip	1000	1
2.24 2.23.1 3.2.01.2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	100 0	arsip								1000	arsip	1000	1
2.24 2.23.1 3 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten Kota yang Digabung dan atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan DesaKelurahan	Persentase arsip perangkat daerah yg digabung/dibubarkan yang selamat	10	%								10	%	10	1

2.24 2.23.1 3.2.03.1	Pendataan Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	50	arsip								50	arsip	50	1
2.24 2.23.1 3.2.03.2	Pendataan Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	50	daftar arsip								50	daftar arsip	50	1
2.24 2.23.1 3 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten Kota	Persentase arsip statis yang diautentikasi & dialihmediakan	30	%			5	%	61.8 2	%	1236%	30	%	91.82	3.0606666 67
2.24 2.23.1 3.2.04.1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	50	arsip								50	arsip	50	1
		Jumlah arsip yang dinyatakan musnah sesuai NSPK					2000	arsip	2000	arsip	100%			2000	
2.24 2.23.1 3.2.04.2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	50	Daftar Arsip								50	daftar arsip	50	1
		Jumlah autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media Kabupaten /Kota					50	arsip	50	arsip	100%			50	
2.24 2.23.1 3 2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten Kota yang Dinyatakan Hilang	Cakupan Arsip Statis yang sudah ditemukan	30	%								30%		0.3	0.01
2.24 2.23.1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan	50	Daftar Arsip								50	daftar arsip	50	1

3.2.05.1	dinyatakan Hilang	Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan													
2.24 2.23.1 3.2.05.2	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	50	Daftar Arsip								51	daftar arsip	51	1.02
2.24 2.23.1 3.2.05.3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip DPA	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	50	Daftar Arsip								50		50	1
2.24 2.23.1 4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	persentase sop arsip yang bersifat tertutup yang telah ditetapkan	0	0			100	%	100	%	100%			100	
2.24 2.23.1 4 2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten Kota	persentase SOP penggunaan arsip yang telah ditetapkan	0	0			100	%	100	%	100%			100	
2.24 2.23.1 4.2.01.1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun	0	0			2	sop	2	sop	100%	0		2	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, birokrasi merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan publik. Dinas perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Ngawi mulai berbenah diri, untuk meninggalkan pelayanan berbelit-belit, berkepanjangan yang dapat menimbulkan kesan buruk dimata masyarakat. Birokrasi (*pelayan*) harus mampu menunjukkan pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas efisiensi biaya dan ketepatan waktu. Dinas perpustakaan dan kearsipan mengampu 2 urusan yaitu

1. Urusan perpustakaan
2. Urusan kearsipan

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan Perangkat Daerah yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sedangkan sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP perangkat daerah dengan indikator Hasil LHE AKIP Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat dengan indikator indeks pembangunan literasi masyarakat
3. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan daerah yang sesuai prinsip dan kaidah Kearsipan Nasional dengan indikator indeks kearsipan
4. Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap pelayanan kearsipan dengan indikator tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan kearsipan

indikator kinerja kunci urusan bidang perpustakaan sesuai dengan dokumen rencana strategis (renstra), yaitu:

1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk
2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat
3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk
4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat

6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya
7. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa
8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item).

Sedangkan indikator kinerja kunci urusan kearsipan sebagai berikut:

1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
4. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK
6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK
7. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan kabupaten/ kota
8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK
9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK
10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK.

Pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci dapat dilihat pada table di bawah ini:

Table 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi

NO	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12	13
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (2022 - 2026)	-	-	50.25	50.35	50.45	50,50	80.05	-	80.05	50,50	
2	Indeks Kearsipan (2022 - 2026)	-	-	55.00	60.00	65.00	70.00	77.18	-	77.18	70.00	
3	Indeks kepuasan pengguna terhadap layanan Kearsipan	-	-	55.00	60.00	65.00	70.00	80	-	80	70.00	
4	-	-	Nilai tingkat kegemaran membaca	60.3	61	61,50	62	60.3	-	61,50	62	
6			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	6,64	6,70	7	7,50	6,64	-	7	7,50	
7			Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	6,14	6,50	7	7,50	6,14	-	7	7,50	
8			Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,01	0,02	0,03	0,04	0,01	-	0,03	0,04	

9			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2,64	2,70	2,90	3	2,64	-	2,90	3	
10			Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	7	10	12	15	7	-	12	15	
11			Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	1	2	3	0	-	2	3	
12			Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	1	2	3	0	-	2	3	
13			Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	18	20	22	24	18	-	22	24	
14	-	-	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	89.00	90.00	91.00	91,50	89.00	-	91.00	91,50	-
15	-	-	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan untuk kepentingan negararakyat	50.00	52.00	54.00	55.00	50.00	-	54.00	55.00	-
16			Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	100	100	100	100	-	100	100	

17			Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	100	100	100	100	-	100	100	
18			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	93,48	94	94,5	95	93,48	-	94,5	95	
			persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN dan JIKN	63,43	64	64,5	64	63,43	-	64,5	64	
19			Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	3807	3900	3950	4000	3807	-	3950	4000	
20			Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	1	2	3	0	-	2	3	
21			Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan kabupaten/ kota	0	1	2	3	0	-	2	3	
22			Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	81	85	88	90	81	-	88	90	
23			Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	17	20	23	25	17	-	23	25	

24			Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	10	15	18	20	10	-	18	20	
----	--	--	---	----	----	----	----	----	---	----	----	--

2.3 Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan kearsipan mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian untuk lebih di tingkatkan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan, Dinas perpustakaan dan Kearsipan tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik masyarakat umum maupun Pemerintah Daerah setempat.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain

1. Koleksi buku masih kurang sesuai dengan kebutuhan pemustaka dikarenakan kemampuan keuangan daerah dan prioritas perangkat daerah
2. Belum tertibnya implementasi penyusutan arsip oleh masing-masing perangkat daerah sebagai pencipta arsip sehingga penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah belum optimal
3. Masih rendahnya koleksi budaya etnis nusantara.
4. Keberadaan records centre sebagai tempat yang menjadi pusat penyimpanan arsip inaktif pada masing-masing perangkat daerah belum optimal sehingga masih sering terjadi arsip bertumpuk tidak tertib pada berbagai unit kerja;
5. Perangkat daerah sebagai pencipta arsip belum mengadakan sarana dan prasarana kearsipan secara efektif;
6. Pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap kearsipan masih rendah.
7. Tenaga fungsional kearsipan dan perpustakaan masih kurang
8. Belum optimalnya penyelamatan dan pemanfaatan arsip

Dampak terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional. Dampak dari pencapaian program dinas perpustakaan dan kearsipan terhadap visi misi kepala daerah yaitu dapat menjadi salah satu faktor pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta dapat memberikan tambahan nilai indeks pelayanan publik sehingga tercipta penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik disebut

juga *good governance*. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang dinas perpustakaan dan kearsipan dalam menyelenggarakan pelayanan adalah :

1. membentuk perpustakaan yang modern secara merata
2. memaksimalkan dan mengoptimalkan tenaga arsiparis untuk Penataan kearsipan pada perangkat daerah dan Lembaga sesuai dengan sistem kearsipan nasional.
3. memaksimalkan dan mengoptimalkan tenaga pustakawan untuk melaksanakan pembinaan terhadap perpustakaan binaan daerah.
4. arsip sebagai bahan utama yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Informasi yang berupa arsip tentu tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan data untuk perencanaan, pengawasan, dan pelaporan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dapat terjadi apabila didukung oleh penyelenggaraan kearsipan yang tertib oleh masing-masing perangkat daerah sebagai pencipta arsip.
5. Koleksi yang beragam serta SDM perpustakaan dan kearsipan mempunyai tekad, niat, motivasi dan dedikasi yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme kerja sehingga berpengaruh terhadap tingkat kunjungan masyarakat.
6. Terpeliharanya koleksi memory kolektif bangsa sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami budaya daerah.

Isu-isu penting yang berkaitan dengan perumusan program dan kegiatan yang akan direncanakan, yaitu:

1. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dan kearsipan.
2. Penelusuran koleksi naskah kuno
3. Membangun perpustakaan di tempat-tempat umum
4. Pendampingan perpustakaan binaan mengikuti akreditasi
5. Penyusutan dan pemusnahan merata pada opd dengan berpedoman pada regulasi yang sudah ditetapkan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Mendasar dari rancangan awal RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi menganalisa terhadap program/kegiatan, target kinerja serta pendanaan yang ada pada rancangan awal RKPD, hasil dari Analisa tersebut terdapat beberapa

kegiatan dan sub kegiatan, target dan kinerja serta pendanaan yang mengalami perubahan. Alasan proses tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain adanya kebijakan dari kepala daerah sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap tetapi tetap berfokus pada pencapaian kinerja, kemampuan keuangan daerah serta prioritas perangkat daerah. Ada beberapa catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, dari rumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dirumuskan ada beberapa yang tidak sesuai.

Sub kegiatan rancangan awal RKPD yang tidak dimunculkan setelah dilaksanakan Analisa kebutuhan, yaitu:

1. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
4. Sub kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota
5. Sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno

sub kegiatan baru yang tidak ada di rancangan awal tapi muncul pada tahapan Analisa kebutuhan, yaitu:

1. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan.
3. Sub kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.
5. Sub kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis.
6. Sub kegiatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun.

7. Sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip.

program/kegiatan/sub kegiatan pada rancangan awal RKPD setelah dilaksanakan Analisa kebutuhan semua program/kegiatan/sub kegiatan tersebut mengalami perubahan pagu anggaran.

Review tersebut disajikan dalam Tabel berikut

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Ngawi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai dengan 4.1)				Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				8,377,571,908				5,601,204,092.00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPK Kab. Ngawi	% Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	5,231,004,908	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	5,078,041,092	
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPK Kab. Ngawi	% Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	8,400,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100%	5,316,000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPK Kab. Ngawi	Jumlah dokumen perencanaan PD yg disusun Jumlah dokumen penganggaran PD yg disusun	6 Dokumen 4 Dokumen	4,850,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	6 Dokumen	2,772,000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPK Kab. Ngawi	Jumlah laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	5 Dokumen	3,550,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	2,544,000	

5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPK Kab. Ngawi	% Dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	4,000,141,908.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	4,586,416,312.00	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPK Kab. Ngawi	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN yang disusun	26 Dokumen	3,997,491,908.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	4,583,968,312.00	
			Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN							
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,650,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2,448,000	
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPK Kab. Ngawi	% ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaian dalam setahun	100%	165,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaian dalam setahun	100%	5,692,500	
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	15,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	-	
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	150,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	5,692,500	

12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPK Kab. Ngawi	% Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	406,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100%	115,255,000	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,550,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	750,000	
14						Penyediaan peralatan dan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	15,105,000	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	32,650,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	10,760,000	
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	4 Paket	31,110,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	4 Paket	2,627,000	
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPK Kab. Ngawi	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	288 Majalah	237,040,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1296 Dokumen	19,296,000	
			Jumlah surat kabar yang dibeli	1.008 eksemplar						

18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	7,650,000					
			Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan	200 Kotak						
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	94,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	66,717,000	
			Jumlah makanan dan minuman Rapat SKPD yang disediakan	1.500 Kotak						
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPK Kab. Ngawi	Persentase barang milik daerah penunjang pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan urusan kebutuhan dalam setahun	100%	49,500,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan urusan kebutuhan dalam setahun	100%	14,371,000	
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	44,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	11,481,000	

22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5,500,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2,980,000	
23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPK Kab. Ngawi	% Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah setahun	100%	428,213,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	294,034,280	
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	375,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23 Laporan	-	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	190,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	140,384,280	
			Jumlah iklan/publikasi media cetak & elektronik	10 Kali				10 Kali		
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Laporan	157,838,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	79,200,000	

27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	80,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74,450,000	
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPK Kab. Ngawi	% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	173,750,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%	56,956,000	
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	16,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1,500,000	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	76,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	17,500,000	
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9,750,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	7,360,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	64,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	2 Unit	30,596,000	

			Dipelihara/Direhabilitasi				Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi			
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPK Kab. Ngawi	Jumlah saranan dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 Unit	8,000,000					
33	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kab. Ngawi	Persentase perpustakaan yang telah menerapkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	10%	2,312,844,000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang telah menerapkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	3%	172,078,000	
			Persentase perpustakaan yang terakreditasi minimal B	10%			Jumlah perpustakaan yang terakreditasi minimal B	1 Perpustakaan		
34	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah perpustakaan yang terakreditasi	3 Perpustakaan	550,000,000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang terakreditasi	2 Perpustakaan	91,500,000	

35	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Ngawi	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000	2 Layanan	150,000,000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000	4 Layanan	49,545,000	
36	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan	150,000,000					
37						Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	16,107,000	
39	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	DPK Kab. Ngawi	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.050 Eksemplar	250,000,000					

40						Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	25,848,000	
41	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68	1,762,844,000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68	80,578,000	
42						Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50 Lokus	25,221,000	
43	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perpustakaan	1,462,844,000					
44	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Ngawi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	6 Orang	150,000,000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	24 Orang	23,003,000	

45	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	150,000,000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	32,354,000	
46	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kab. Ngawi	persentase peningkatan pelestarian naskah kuno & koleksi	10 Naskah	50,097,000	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN	persentase peningkatan pelestarian naskah kuno & koleksi	10 Naskah	15,643,000	
47	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan	5 Naskah	50,097,000	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan	5 Naskah	15,643,000	
48	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Ngawi	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	40 Orang	50,097,000					
49						Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan	3 eksemplar	15,643,000	

							Didayagunakan			
						Pengembangan koleksi budaya etnis Nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah koleksi local baru kabupaten yang ditemukan	5 koleksi	50,000,000,000	
						Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	8 Eksemplar	25.000.000,00	
						Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase peningkatan koleksi lokal Kabupaten yang ditentukan dan dirawat	8 Eksemplar	25.000.000,00	
50	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kab. Ngawi	% PD yang menerapkan kearsipan secara baku	23%	373,626,000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan kearsipan secara baku	61%	187,721,500	
51	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Ngawi	Jumlah PD yang sudah melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	8 PD	127,026,000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan arsip dinamis secara baku	8 PD	143,003,000	
52						Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	50 berkas	45,472,000	

53	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan	127,026,000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Laporan	97,531,000	
54	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Persentase PD yang telah menyerahkan arsip statisnya	17%	100,000,000	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang sudah dikelola	17%	20,411,000	
55	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Ngawi	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	100,000,000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	250 Arsip	20,411,000	
56	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	Kab. Ngawi	Persentase arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	30%	146,600,000	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	250 Arsip	24,307,500	
57	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan & Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota	25 Laporan	146,600,000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan & Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten / Kota	100 Laporan	24,307,500	
58	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kab. Ngawi	Persentase arsip yang terselamatkan sesuai NSPK	100%	410,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Arsip statis yang terlindungi dan terlestarikan	4000 arsip	147,720,500	

60	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Ngawi	Jumlah arsip yang terselamatkan	1.000 Arsip	50,000,000	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase arsip yang dimusnahkan	4000 Arsip	36,223,000	
61	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Ngawi	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1.200 Arsip	50,000,000	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1.200 Arsip	14,650,000	
						pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	500 berkas	21,573,000	
62	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kab Ngawi	Jumlah arsip perangkat daerah yang digabung/dibubarkan yang diselamatkan	400 Arsip	160,000,000	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip perangkat daerah yang digabung/dibubarkan yang diselamatkan	400 Arsip	58,535,000	
63	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip	200 Daftar Arsip	80,000,000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau	200 Daftar Arsip	40,000,000	

	Kabupaten/Kota		bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota	Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
64	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Ngawi	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten /Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten /	200 Arsip	80,000,000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4000 Arsip	18,535,000	
65	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	Persentase arsip statis yang diautentikasi	5%	50,000,000	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang sudah diautentikasi dan dialih mediakan	5%	35,797,500	
37	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Ngawi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	50 Daftar Arsip	50,000,000	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	50 Daftar Arsip	27,682,500	
38						Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	4000	8,115,000	

39	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang	Kab. Ngawi	Jumlah Arsip Statis yang dinyatakan hilang tapi sudah ditemukan	50 Arsip	150,000,000	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang	Persentase arsip statis yang sudah ditemukan	50 Arsip	17,165,000	
40	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kab. Ngawi	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	50 Daftar Arsip	50,000,000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	40 Daftar Arsip	6,480,000	
41	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Kab. Ngawi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	50 Daftar Arsip	50,000,000	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	40 Daftar Arsip	9,630,000	
42	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kab. Ngawi	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	50 Daftar Arsip	50,000,000	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	40 Daftar Arsip	1,055,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan.

Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perpustakaan dan Kearsipan menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi harus ada telaah terhadap kebijakan dan arah pembangunan tersebut agar terjadi keselarasan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perpustakaan dan Kearsipan. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi merupakan bagian dan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan Propinsi, serta bagian sistem Perencanaan Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat pusat seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional, di tingkat Propinsi seperti RPJP Propinsi Jawa Timur 2005 - 2025, RPJM Propinsi Jawa Timur 2019-2024, RKPD Propinsi Jawa Timur 2024, serta di tingkat Kabupaten yaitu RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026 dan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Ngawi

NO	Kebijakan Nasional / Propinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Misi Presiden tahun 2019-2024		
	Nasional		
1	Misi I	RPJM	
	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Nasional	
2	MISI II	RPJM	
	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Nasional	
3	MISI III	RPJM	
	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Nasional	

4	MISI IV	RPJM Nasional	
	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
5	MISI V	RPJM Nasional	
	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa		
6	MISI IV	RPJM Nasional	
	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya		
7	MISI VII	RPJM Nasional	
	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		
8	MISI VIII	RPJM Nasional	
	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
9	MISI IX	RPJM Nasional	
	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		
	Arahan Presiden		
1	Pembangunan SDM		
2	Pembangunan Infrastruktur		
3	Penyederhanaan Regulasi		
4	Penyederhanaan Birokrasi		
5	Transformasi Ekonomi		
B	Propinsi		
1	MISI I	RPJM Propinsi	
	Mewujudkan Keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok’ antar sector dan keterhubungan wilayah		
2	MISI II	RPJM Propinsi	
	Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.		

3	MISI III	RPJM	
	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.	Propinsi	
4	MISI IV	RPJM	
	Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.	Propinsi	
C	Kabupaten		
1	MISI I	RPJMD	
	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat	KABUPATEN NGAWI	
2	MISI II	RPJMD	
	Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi	KABUPATEN NGAWI	
3	MISI III	RPJMD	
	Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima	KABUPATEN NGAWI	
4	MISI IV	RPJMD	
	Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang	KABUPATEN NGAWI	

	berkesinambungan		
5	MISI V	RPJMD	
	Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong	KABUPATEN NGAWI	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi.

A. Tujuan

Tujuan menggambarkan implementasi dari pernyataan misi yang merupakan kondisi yang ingin dicapai sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan kerangka dan arah prioritas program dan aktivitas organisasi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dinas perpustakaan dan kearsipan memiliki 2 urusan yaitu urusan bidang perpustakaan dan urusan bidang kearsipan, untuk urusan perpustakaan mendukung pencapaian misi ke-1 dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan , sedangkan untuk urusan kearsipan mendukung pencapaian misi dan misi ke-3, Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima dengan tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik, tujuan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi yang tertuang dalam dokumen rencana strategis (renstra) adalah:

- 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasikan dalam bentuk rencana tindakan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu guna pencapaian tujuan dengan lebih menekankan pada pemanfaatan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien. Sesuai tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan maka dinas perpustakaan dan kearsipan menetapkan 2 Sasaran Strategis yaitu

- 1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah dengan indikator Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah dengan target 82,05 dan target akir perencanaan sebesar 83

2. Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat dengan indikator indeks pembangunan literasi masyarakat dengan target 50.45 dan target akir perencanaan untuk indikator sebesar 50.55
- sedangkan untuk tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik maka dinas perpustakaan dan kearsipan menetapkan 2 sasaran strategis yaitu:
1. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan daerah yang sesuai prinsip dan kaidah Kearsipan Nasional dengan indikator indeks kearsipan dengan target 65 dan target akir perencanaan untuk indikator tersebut sebesar 70
 2. Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap pelayanan kearsipan dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan kearsipan dengan target 65 nilai dan target akir perencanaan untuk indikator tersebut sebesar 75 nilai.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan		Indeks Pendidikan	10,00-10,02
		Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	82,05 (A)
		Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	50.45
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik	4,68-5,08
		Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan daerah yang sesuai prinsip dan kaidah Kearsipan Nasional	Indeks Kearsipan	65.00
		Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan	Indeks kepuasan pengguna terhadap pelayanan kearsipan	65.00

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam pencapaian visi bupati “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”, Dinas Perpustakaan dan kearsipan mengampu misi 1 dan misi 3, urusan perpustakaan ada pada misi 1 sedangkan urusan kearsipan ada pada misi 3, sehingga dalam upaya pencapaian misi 1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berfokus pada kegiatan yang mendukung terwujudnya pembangunan literasi masyarakat, pada misi 3 berfokus pada peningkatan indeks kearsipan dan pelayanan kepada masyarakat terhadap pengguna layanan kearsipan. Dalam upaya pencapaian SDGs Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berada dalam pilar pembangunan hukum dan tata kelola dengan tujuan Perdamaian, Keadilan, kelembagaan yang tangguh. Sedangkan untuk kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mendukung dalam pencapaian sdgs tahun 2022 yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pelestarian dan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun, Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota.

Jumlah program keseluruhan ada 5 program , 18 kegiatan dan 51 sub kegiatan direncanakan untuk tahun 2024 dimana untuk pelaksanaan program kegiatan menyebar dengan sasaran seluruh perangkat daerah dan masyarakat Kabupaten Ngawi sehingga pelayanan perpustakaan dan kearsipan dapat dinikmati semua masyarakat ngawi. Total keseluruhan pagu untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.601.204.092,00-. Ada beberapa rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dikarenakan ada beberapa program kegiatan yang di tunda terlebih dahulu karena keterbatasan anggaran dan prioritas kegiatan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama. Program /kegiatan tersebut

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Ngawi

Kode Rekening					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					DAU			
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.601.204.092,00	DAU			8.565.537.327,88
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.265.762.092,00	DAU			8.565.537.327,88
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang pemerintahan daerah dalam setahun	Kab. Ngawi	100%	5.078.041.092,00	DAU		100%	7.519.537.327,88
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun	Kab. Ngawi	100%	5.316.000,00	DAU		100%	5.056.693.327,88
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	6 Dokumen	2.772.000,00	DAU		6 Dokumen	4.750.000,00
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi	7 Laporan	2.544.000,00	DAU		7 Laporan	3.450.000,00

2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi	100%	4.586.416.312,00	DAU		100%	4.040.168.327,88
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ngawi	36 Orang/bulan	4.583.968.312,00	DAU		36 Orang/bulan	4,037,468,327.88
2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ngawi	1 Laporan	2.448.000,00	DAU		1 Laporan	2,700,000.00
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	Kab. Ngawi	100%	5.692.500,00	DAU		100%	115.000.000,00
2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Ngawi	40 Paket	0,00	DAU		40 Paket	15.000.000,00
2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Ngawi	44 Orang	5.692.500,00	DAU		44 Orang	100.000.000,00
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	Kab. Ngawi	100%	115.255.000,00	DAU		100%	123.350.000,00
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	1 Paket	750.000,00	DAU		1 Paket	3,650,000.00
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	13 Paket	15.105.000,00	DAU		13 Paket	21000000
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	5 Paket	10.760.000,00	DAU		5 Paket	25.000.000,00

2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Ngawi	3 Paket	2.627.000,00	DAU		3 Paket	21.000.000,00
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Ngawi	1296 Dokumen	19.296.000,00	DAU		1296 Dokumen	27,700,000.00
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ngawi	50 Laporan	66.717.000,00	DAU		50 Laporan	25.000.000,00
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	Kab. Ngawi	100%	14.371.000,00	DAU		100%	150.500.000,00
2	23	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Ngawi	1 Unit	0,00	DAU		1 Unit	100.000.000,00
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi	3 Unit	11.481.000,00	DAU		3 Unit	45.000.000,00
2	23	01	2.08	0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi	1 Unit	2.890.000,00	DAU		1 unit	5.500.000,00
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah setahun	Kab. Ngawi		294.034.280,00	DAU			
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ngawi	23 Laporan	0,00	DAU		23 Laporan	375.000,00

2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Ngawi	48 Laporan	140.384.280,00	DAU		48 Laporan	190.000.000,00
2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	12 Laporan	79.200.000,00	DAU		12 Laporan	170.500.000,00
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi	12 Laporan	74.450.000,00	DAU		12 Laporan	80,000,000.00
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Kab. Ngawi	100%	56.956.000,00	DAU		100%	178,600,000.00
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Ngawi	1 Unit	1.500.000,00	DAU		1 Unit	16,000,000.00
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Ngawi	6 Unit	17.500.000,00	DAU		6 Unit	76000000
2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Ngawi	5 Unit	0,00	DAU		5 Unit	4,850,000.00
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Ngawi	30 Unit	7.360.000,00	DAU		30 Unit	9.750.000,00
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Ngawi	2 Unit	30.596.000,00	DAU		2 Unit	64.000.000,00

2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Ngawi	16 Unit	0,00	DAU		16 Unit	8.000.000,00
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang telah menerapkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial	Kab. Ngawi	3%	172.078.000,00	DAU		3%	2.362.844.000,00
						Jumlah perpustakaan yang terakreditasi minimal B	Kab. Ngawi	1 perpustakaan				1 perpustakaan	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang terakreditasi	Kab. Ngawi	2 perpustakaan	91.500.000,00	DAU		2 perpustakaan	800.000.000,00
2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Kab. Ngawi	4 Layanan	49.545.000,00	DAU		4 Layanan	175,000,000.00
2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kab. Ngawi	5 Perpustakaan	-	DAU		5 Perpustakaan	175.000.000,00

2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	30 Orang	16,107,000.00	DAU		30 Orang	150.000.000,00
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kab. Ngawi	2400 Eksemplar	-	DAU		2400 Eksemplar	150.000.000,00
2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	2 Dokumen	25,848,000.00	DAU		2 Dokumen	50.000.000,00
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Kab. Ngawi	75 nilai	80,578,000.00	DAU		75 nilai	
2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kab. Ngawi	50 Lokus	25,221,000.00	DAU		50 Lokus	50.000.000,00
2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	2 Perpustakaan	-	DAU		2 Perpustakaan	1,312,844,000.00
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kab. Ngawi	24 Orang	23,003,000.00	DAU		24 Orang	100,000,000.00

2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Ngawi	5 Perpustakaan	32,354,000.00	DAU		5 Perpustakaan	50,000,000.00
2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Kab. Ngawi	1 Orang	-	DAU		1 Orang	50,000,000.00
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan pelestarian naskah kuno dan koleksi lokal	Kab. Ngawi	43%	15,643,000.00	DAU		43%	100.000.000,00
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan	Kab. Ngawi	5 naskah	15,643,000.00	DAU		5 naskah	50.000.000,00
2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Ngawi	50 Orang	-	DAU		50 Orang	25.000.000,00
2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kab. Ngawi	3 Eksemplar	15,643,000.00	DAU		3 Eksemplar	25.000.000,00
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Lokal baru Kabupaten yang ditemukan	Kab. Ngawi	166%	-	DAU		166%	50.000.000,00
2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Kab. Ngawi	8 Eksemplar	-	DAU		8 Eksemplar	25.000.000,00

2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase peningkatan koleksi lokal Kabupaten yang ditentukan dan dirawat	Kab. Ngawi	8 Eksemplar	-	DAU		8 Eksemplar	25.000.000,00
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		Kab. Ngawi		335,442,000.00	DAU			1.046.000.000,00
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan kearsipan secara baku	Kab. Ngawi	61%	187,721,500.00	DAU		61%	576.000.000,00
							Kab. Ngawi						
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan arsip dinamis secara baku	Kab. Ngawi	8 opd	143,003,000.00	DAU		8 opd	250.000.000,00
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kab. Ngawi	50 Berkas	45.472.000,00	DAU		50 Berkas	150.000.000,00
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	24 Laporan	97.531.000,00	DAU		24 Laporan	100.000.000,00
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang sudah dikelola	Kab. Ngawi	17%	20.411.000,00	DAU		17%	156.000.000,00
2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Ngawi	250 Arsip	20.411.000,00	DAU		250 Arsip	156.000.000,00
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Kab. Ngawi	35%	24.307.500,00	DAU		35%	170.000.000,00

2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	100 Laporan	24.307.500,00	DAU		100 Laporan	170.000.000,00
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyerahkan arsip statisnya	Kab. Ngawi	50%	147,720,500.00	DAU			470.000.000,00
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase arsip yang dimusnahkan	Kab. Ngawi	17%	36,223,000.00	DAU		17%	100.000.000,00
2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Ngawi	4000 Arsip	14.650.000,00	DAU		4000 Arsip	50.000.000,00
2	24	03	2.01	0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Kab. Ngawi	5000 Berkas	21.573.000,00	DAU		5000 Berkas	50.000.000,00
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip Perangkat Daerah yang digabung/dibubarkan yang diselamatkan	Kab. Ngawi	400 arsip	58,353,000.00	DAU		400 arsip	100.000.000,00
2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	200 Daftar	40.000.000,00	DAU		200 Daftar	50.000.000,00

2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi	200 Arsip	18.535.000,00	DAU		200 Arsip	50.000.000,00
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang sudah diautentikasi dan dialih mediakan	Kab. Ngawi	5%	35,979,500.00	DAU		5%	90.000.000,00
2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Kab. Ngawi	4000 Arsip	27.682.500,00	DAU		4000 Arsip	50.000.000,00
2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Ngawi	4000 Arsip	8.115.000,00	DAU		4000 Arsip	40.000.000,00
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip statis yang sudah ditemukan	Kab. Ngawi	5%	17.165.000,00	DAU		6%	180.000.000,00
2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Kab. Ngawi	40 Arsip	6.480.000,00	DAU		40 Arsip	100.000.000,00
2	24	03	2.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Kab. Ngawi	40 Arsip	9.630.000,00	DAU		40 Arsip	100.000.000,00
2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Kab. Ngawi	40 Arsip	1.055.000,00	DAU		40 Arsip	40.000.000,00

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari visi dan misi yang mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan penentuan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dengan tetap mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat dan perangkat daerah, beberapa kegiatan lainnya akan dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang telah ditetapkan, prioritas program dan kegiatan didasarkan pada urgensi peruntukannya, sehingga harus ada yang diprioritaskan terlebih dahulu berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Rencana tindak lanjut pelaksanaan program dan kegiatan sudah tersusun sesuai rencana aksi dan aliran kas sehingga diharapkan apa yang menjadi target indikator kinerja yang sudah ditetapkan dapat terlaksana sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Rencana Kerja Tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 dan penyelesaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021 - 2026, sehingga apa yang menjadi kekurangan / catatan di tahun 2022 dan 2023 bisa menjadi acuan untuk keberhasilan di tahun 2024.

Demikian penyusunan dokumen perencanaan ini dipergunakan sebagai pedoman operasional untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.



BUPATI NGAWI,

QNY ANWAR HARSONO